



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM AHFASY**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **76735**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.280.000.000

1. Tanah Seluas 1441 m2 di NGANJUK, WARISAN Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/105 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 1692 m2 di NGANJUK, WARISAN Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 1744 m2 di NGANJUK, WARISAN Rp. 45.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/45 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 349.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV/MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 66.350.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.750.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.700.100.000

III. HUTANG

Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.700.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.